Membangun Ekonomi Syariah: Antara Peluang dan Tantangan

KARSA

Majalah Ekonomi Kreatif

Trias Santosa

Dari PT DI Ke Airbus Hamburg Jerman

H. Syarif Bastaman, SH, MBA

Presiden Harus Sanggup Berkata:

CUKUP...!

RP. 20.000

ISSN 2088-8414

Vol. 1 No. 12 • Nopember 2012

KARSA
Majalah Ekonomi Kreatif

memperluas wawasan
meningkatkan kecerdasan

Pemimpin Umum
Burhanuddin Abdullah

Pemimpin Perusahaan
Tika Noorjaya

Pemimpin Redaksi
Abdullah Mustappa

Dewan Redaksi
Burhanuddin Abdullah,
Ajip Rosidi, Ina Primiana,
Dadang Mohammad,
E. Saefullah Wiradipradja,
Entang Sastraatmadja
Tika Noorjaya
Abdullah Mustappa, Jamaludin
Rachmat Taufiq Hidayat
Fina Sastrawinata

Redaksi
Iwan T. P., Teguh

Redaksi Eksekutif
Atep Kurnia

Sekretaris & Keuangan
Zakia Lutfiyani

Foto
Darma Legi

Desain Grafis & Ilustrasi
Ayi R. Sacadipura

Pemasaran
Iwan Tega Prihatin
Nandang Ruhimat

Kontributor
Ibnu Hijar Appandi
Apri Subagyo
Pungkit, Novita

Penerbit
Koperasi Mataholang

Alamat
Jl. Gunung Batu No.47 F Bandung
Telp. 022-6614042
Fax. 022-6614042
e-mail: karsamajalah@gmail.com
website: majalahkarsa.com

Redaksi menerima tulisan seputar masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Tulisan dapat dikirim via e-mail atau dengan pos ke alamat redaksi. Tulisan yang dimuat akan mendapat imbalan. Wartawan KARSA tidak menerima tips dalam bentuk apapun dari narasumber.

Penunjuk Arah Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah di Indonesia ibarat anak kambing yang ditinggalkan induknya, bingung ke arah mana harus melangkah. Awalnya, pilihannya sangat jelas bahwa ekonomi syariah bukan ekonomi riba. Lebih dari itu, ekonomi syariah menawarkan janji terciptanya sistem ekonomi yang menyejahterakan. Bukan ekonomi yang menghisap, menguras dan menindas.

Tapi sekian puluh tahun telah ditempuh, obor yang dijanjikan belum juga dapat dinyalakan. Kalaupun apinya muncul, hanya sekejap dan yang lebih banyak terdengar adalah kata-kata. Yang namanya kesejahteraan dan dapat dinikmati oleh masyarakatnya justru muncul di tempat lain. Padahal di sana kriteria syariah hampir tidak pernah disebut-sebut.

Lalu di mana persoalannya?

Mayoritas umat Islam yang hidup di Indonesia sebenarnya sudah lama terombang-ambing mengunyah makna riba yang haram. Secara tradisional kita percaya bahwa bank itu haram karena mengandalkan hidupnya dari rente. Tapi anehnya, para ulama, dari siapa fatwa tersebut sering diucapkan, menyimpan uangnya di bank. Sementara umat dibiarkan bimbang dan meragukan makna fatwa yang tadinya mereka akui kebenarannya.

Maka wajarlah kalau kemudian munculnya ekonomi syariah diterima dengan rasa sukacita, meski disertai pengertian yang belum jelas benar. Di kemudian hari, yang kita alami adalah suasana seperti hari ini, pemaknaan syariah yang masih belum bisa dimengerti dengan mudah.

KARSA nomor ini mencoba mengetengahkan kembali persoalan tersebut. Alasan utamanya, masih seperti yang dulu, sangat sederhana. Kepercayaan kita kepada sistem ekonomi syariah belum benar-benar pupus. Masih ada harapan yang layak untuk tetap dipelihara. Apalagi, di beberapa negara sistem ekonomi kapitalistik sudah tampak terkena encok dan terbukti tidak ada cara yang mudah untuk menyembuhkannya. Di Amerika Serikat, pusat kekuatan kapitalisme yang sangat luarbiasa, bahkan mulai ditawarkan aspek-aspek kesejahteraan, yang sejatinya menjadi hakekat tujuan sistem ekonomi syariah, meski masih tetap dalam bingkai kapitalistik.

Mestinya, saat ini, sistem ekonomi syariah dibuktikan sebagai solusi yang dapat mengembalikan situasi yang galau menjadi normal kembali. Pada tempatnya pula jika di sini ada penekanan yang lebih bermakna bahwa sistem ekonomi syariah, seperti mengemuka dalam tulisan **Agus Sumarno**, bukan pilihan melainkan keharusan.

KARSA edisi yang ada di tangan Anda ini juga menyajikan obrolan pendek tapi padat dengan **Syarif Bastaman**, sosok muda yang pikiran-pikirannya layak disimak sebagai salah satu sumbangan untuk terbentuknya Indonesia di masa depan yang tidak terlalu jauh.[]

Koperasi Berkemerdekaan Kemerdekaan Berkoperasi

Oleh **ERY SUPRIYADI R.**

MENGINJAK HARI KOPERASI KE-65 DAN USIA REPUBLIK INDONESIA YANG KE-67 DI TAHUN 2012 INI, TERSAJI KAJIAN MAUPUN OPINI DI MEDIA MASSA YANG MENSINYALIR ADANYA DINAMIKA KEBANGSAAN YANG TERINDIKASI BERHADAPAN DENGAN PERSOALAN MELEMAHNYA RASA NASIONALISME, PATRIOTISME, DAN DAYA JUANG.

Penjajahan peperangan secara frontal fisik dengan penjajah telah usai, namun sisa-sisa penjajahan dalam bentuk lainnya masih terasa dan nyata, misal politik divide et impera. Masyarakat terindikasi terkotak-kotak dalam kehidupan yang cenderung ego-sentris dan eksklusif yang ditandai dengan semakin melemahnya nilai kolektivitas masyarakat, di antaranya, munculnya konflik social dalam kegiatan pada ruang publik, konflik antar etnis, disparitas kegiatan pengembangan ekonomi antar sektor maupun antar wilayah, maupun hedonisme dan vandalisme. Apakah ini menunjukkan solidaritas dan kooperativisme juga semakin terkikis dalam kehidupan ekonomi di negeri ini ?

Cukup menarik untuk disimak secara faktual (data BPS, 2006) menunjukkan bahwa usaha kecil memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi negeri, diantaranya sebagai penyumbang terbesar aspek penyediaan lapangan kerja, aspek pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), aspek ekspor dan aspek sumbangan dalam investasi. Secara kuantitas, jumlah unit usaha yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori UKM mencapai lebih dari 99,9% yang terdiri dari usaha mikro 96.2% usaha kecil 3.6 % dan usaha menengah 0.2%, sedangkan usaha besar sebanyak 0.01 persen. Selanjutnya, ditinjau dari aspek penyediaan lapangan kerja, usaha mikro dan kecil mampu menyediakan lapangan kerja sebesar 91.1%, usaha menengah sebesar 5% dan usaha besar sebanyak 3,8%. Selanjutnya bila ditinjau dari aspek sumbangan dalam pembentukan PDB, maka usaha mikro dan kecil menyumbang 37.7%, usaha menengah 15.6% dan usaha besar 46.7 persen.

Data ini mengindikasi bahwa usaha kecil, menengah mendominasi serapan tenaga kerja, namun belum memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. KUMKM seakan-akan menjadi sektor yang terindikasi terpinggirkan dalam pengembangan ekonomi atau cenderung marjinal dalam ekonomi pembangunan. Sangat ironis, jika kita menengok kembali kejadian saat krisis ekonomi tahun 1998, dimana KUMKM memberikan sumbangan yang sangat besar dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi dalam bentuk serapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi

yang positif, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun sejurus dengan bergulirnya reformasi, ternyata diikuti pula bergulirnya peran KUMKM yang semakin muram, sejalan dengan tekanan sistem pasar bebas, globalisasi, disamping kelemahan kemampuan internal KUMKM dalam mengelola peluang ataupun keterbatasan diri menghadapi tantangan bisnis. Masih adakah kemampuan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha mampu menunjukkan kinerja yang tinggi dan kesungguhannya dalam berkontribusi bagi pembangunan? Tentunya, jawabnya adalah koperasi harus ada dan mampu sebagai penyeimbang dalam pembangunan.

Masih mampukah koperasi berkontribusi dalam iklim kemerdekaan saat ini bagi pertumbuhan, stabilitas, dan kemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Atau sebaliknya tidak ada ruang kemerdekaan koperasi untuk berkembang, atau sudah tidak ada ruang kemerdekaan untuk berkoperasi. Masih adakah kemerdekaan bagi koperasi untuk berkembang ? Pertanyaan ini muncul sejalan dengan semakin kentalnya kebijakan-kebijakan sektoral maupun wilayah yang belum berpihak terhadap keberadaan koperasi.

Pertanyaan lainnya yang muncul adalah masih adakah koperasi yang berkemerdekaan, artinya koperasi memiliki otonomi luas, kewenangan penuh terhadap usahanya, dan berjati diri koperasi yang memegang teguh prinsip koperasi dan menjalankan secara murni dan konsekuen dalam kegiatan usaha dan organisasi koperasinya. Berapa banyak koperasi yang berkemerdekaan yang masih utuh berkembang? Bagaimana pula upaya berbagai pihak untuk mengendalikan praktek koperasi yang sebenarnya bukan koperasi, menertibkan koperasi yang berlindung dengan nama koperasi tetapi berpraktek rentenir atau merugikan nasabah/investor.

Kilas Jejak Koperasi Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan koperasi sangat berkait erat dengan pemerintahan. Ketika jaman Jepang, koperasi hanya dijadikan alat politik bagi Jepang untuk menampung hasil bumi demi memenuhi kebutuhan bagi kepentingan penjajahan Jepang itu sendiri. Koperasi dijadikan instrumen kepanjangan tangan kekuasaan dan kekuatan politik dan penjajahan. Ketika jaman orde baru, koperasi tumbuh dan berkembang pada berbagai sektor, komoditas, dan wilayah, termasuk pengembangan koperasi perdesaan dan perkotaan. Namun faktual menunjukkan bahwa runtuhnya rezim Soeharto diikuti pula dengan semakin menurunnya keberadaan dan peran koperasi dalam perekonomian. Apakah ini berarti bahwa reformasi telah menggusur kemerdekaan berkoperasi dan koperasi tidak berkemerdekaan, artinya koperasi kurang atau tidak diberi ruang yang layak berkiprah dalam pengembangan ekonomi bangsa ini, atau perkembangan koperasi terkooptasi oleh

Koperasi pada satu sisi dijadikan kendaraan politik dalam pemilihan kepala daerah atau pemerintahan, tetapi programnya bersifat remedial, putus nyambung, tidak berkelanjutan.

kepentingan ekonomi elitis yang cenderung kapatalistik. Ataukah koperasi terjerambab dalam arena globalisasi yang penuh lubang-lubang jebakan dengan berbagai intriknya.

Secara dokumen pembangunan nasional (RJPMN) atau rencana strategi pembangunannya, kedudukan koperasi tertulis secara tepat dalam bentuk strategi, rumusan, kebijakan, dan program bagi penguatan KUMKM, namun pada sisi implementasinya ternyata masih terdapat kebocoran dan jebakan-jebakan bagi KUMKM itu sendiri yang kadangkala mendorong KUMKM masuk ke dalam politik ekonomi semu dan kamuflase pencitraan koperasi. Koperasi pada satu sisi dijadikan kendaraan politik dalam pemilihan kepala daerah atau pemerintahan, tetapi programnya bersifat remedial, putus nyambung, tidak berkelanjutan. Artinya koperasi dijadikan kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan, namun tidak sedikitpun para pemimpin yang setelah terpilih ini berniat secara serius untuk mengembangkan koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi rakyat yang unggul yang mampu mensejahterakan rakyat dan masyarakat. Koperasi terindikasi dijadikan sapi perahan suatu program pembangunan jangka pendek atau dimasukkan ke dalam jebakan pembangunan sebagai target hegemoni kapitalistik.

Kejadian yang juga cukup ironis adalah setelah seseorang terpilih sebagai pemimpin daerah, malah keberadaan koperasi ditinggalkan atau bahkan dilecehkan peranannya. Koperasi dianggap sebagai badan usaha kumuh, badan usaha tidak menjanjikan keuntungan, badan usaha yang susah maju, badan usaha terpinggirkan, badan usaha yang tidak prospektif, dan citra negatif lainnya terhadap koperasi. Kebijakan-kebijakan pembangunan juga ikut-ikutan menegaskan koperasi dan cenderung lebih memihak kepada kaum pemilik modal dan pengusaha yang *"memberikan keuntungan"* walau harus diikuti dengan eksternalitas negative terhadap lingkungan hidup. Padahal disisi lain, koperasi adalah entitas yang menaungi gerakan ekonomi rakyat secara potensial berperan sebagai koalisi dari anggotanya bekerjasama mengelola sumberdaya secara kolektif dan akuntabel dan menjaga keramahan lingkungan alam dimana koperasi itu berada.

Tidaklah dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini, koperasi belum memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian (*cooperative share* dan *cooperative economic size* masih kecil), namun sejatinya koperasi akan mampu mem-

Bersambung ke hal 52

berikan sumbangan yang nyata bagi perekonomian dalam mengisi kemerdekaan ini jika terdapat kemandirian gerakan koperasi, kemerdekaan gerakan koperasi, dan koperasi diberi ruang gerak yang lebih terbuka dan benar (bukan dikooptasi atau dimarjinalkan). Artinya koperasi diberi ruang gerak dan memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya untuk semakin tumbuh dan berkembang. Pengembangan koperasi, bukanlah berarti hanya sebatas memberikan pengakuan terhadap keberadaan koperasi, tetapi memberi ruang gerak secara merdeka kepada gerakan koperasi guna menumbuhkembangkan koperasi berperan aktif sebagai roda maupun mesin penggerak ekonomi kerakyatan yang tangguh, bukan menjadikan koperasi sebagai hanya sebatas badan usaha yang dikooptasi untuk kepentingan bisnis atau politik ekonomi semata, terlebih-lebih memarjinalkannya.

Koperasi sebagai sebuah gerakan memiliki kemerdekaan untuk berpendapat, bersikap, dan bertindak guna memerdekakan dirinya dari penjajahan pemikiran atau berani menghentakkan ruang gerak perannya dalam berkegiatan ekonomi dalam menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Koperasi yang merdeka harus berani keluar dari kungkungan program, jika program tersebut hanya cenderung mengkooptasi keberadaan koperasi. Namun koperasi harus sanggup menunjukkan kinerja progresif yang positif ketika berafiliasi dalam program pemerintah, dengan prestasi yang saling memberi manfaat bagi keberadaan, keberlanjutan, dan pertumbuhan gerakan koperasi dalam berbagai spektrum pembangunan, baik keuangan, manajerial, sistem informasi, pelayanan, penelitian dan pengembangan, maupun pembelajaran dan pendidikan. Kapitalis berhasil karena *Capital Safety Netnya*, demikian pula halnya koperasi juga berhasil karena *Social Safety Netnya*. Koperasi berperan sebagai *Social Safety Net* pada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

Koperasi pertanian, KUD, koperasi perikanan, koperasi perkebunan, koperasi peternakan, koperasi tebu, koperasi agroekowisata, koperasi simpan pinjam, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, koperasi pegawai, koperasi guru, koperasi siswa, dan berbagai jenis koperasi lainnya haruslah bangkit kembali dengan kemandiriannya sebagai gerakan koperasi, bukan hanya sebatas sebagai perusahaan koperasi konvensional atau kaki tangan kepanjangan program semata, tetapi haruslah progresif dan berkeyakinan diri mampu menolong diri sendiri . Seluruh koperasi selayaknya kembali ke khittahnya sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang mandiri, menegakkan jati diri koperasi sebagai organisasi yang mampu menolong dirinya sendiri (*self help, self reliant,self-sustaining enterprise*) dan me-ningkatkan kesadaran diri bekerjasama yang utuh untuk keluar dari keterkungkungan maupun jebakan pembangunan ekonomi. Agaknya gerakan koperasi harus mulai serius dan lebih terukur bertindak dalam mengambil peran pada sektor strategis, diantaranya bidang pertambangan, energi, air, transportasi, pelayaran,penerbangan, pariwisata, teknologi ramah lingkungan, dan lainnya. Pertanyaannya adalah sudah siapkah koperasi, bagaimana kesanggupan infrastruktur koperasi meraih peluang usaha ini, sejauhmana kemampuan SDMnya, apakah suprastruktur kebijakannya berafiliasi dengan eksistensi koperasi dalam sektor itu, serta sejauhmana daya jangkau koperasi terhadap kebijakan yang ada?

Vitalisasi Koperasi

Memperkuat koperasi yang berkemerdekaan tidaklah seperti membalik telapak tangan, tetapi diperlukan daya, semangat juang dan upaya untuk menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Koperasi berkemerdekaan adalah koperasi yang memiliki jati diri koperasi yang teguh pada prinsip dan nilai koperasi serta menunjukkan peran konkrit dalam pembangunan perekonomian baik pada tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Dengan usahanya tersebut, koperasi memberi nilai manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung kepada segenap anggotanya disamping pula kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya hanya menjadi utopia dan romantisme koperasi belaka, manakala gerakan koperasi tidak sanggup keluar dari ketergantungan atau terjebak dalam program kamuflasi pembangunan yang bersifat semu dan remedial.

Gerakan koperasi harus memiliki keberanian untuk meyakinkan dirinya dan segenap pelaku ekonomi bahwa keberadaan koperasi memberi manfaat bagi pembangunan. Koperasi menunjukan kemampuan dalam olah bisnis dan olah organisasi koperasi sebagai organisasi modern, dan memberi ciri jati diri positif dan perilaku solidaritas yang tinggi dalam berinteraksi secara internal maupun eksternal. Vitalisasi koperasi bermakna memperkuat produktivitas dan reproduksi koperasi dalam berbagai bidang social ekonomi dan kegiatan koleksi, distribusi,maupun konsumsi baik barang maupun jasa. Gerakan koperasi harus mampu memvitalisasi dirinya dan menunjukan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Paling tidak terdapat lima hal penting dalam memvitalisasi koperasi, yaitu peta strategik (*strategic map*) pengembangan koperasi yang matang, kinerja positif usaha dan organisasi koperasi, keaktifan tinggi dan pencitraan koperasi yang positif, penelitian dan pengembangan koperasi yang terukur, dan penguatan sumberdaya manusia bagi operasionalisasi koperasi. Kelima hal ini menjadi benteng bagi koperasi berkemerdekaan dan kemerdekaan berkoperasi yang kuat berjati diri, dan mandiri tangguh.[]

Ery Supriyadi R.
Staf pengajar Ikopin, Bandung

PALING BANYAK HASILNYA
Hujan Rezeki
TABUNGAN PRAKTIS
01.09.2012 - 28.02.2013
Segera buka Tabungan PRAKTIS !
ALTO
ATM BERSAMA
SABTU & MINGGU
KANTOR CABANG TETAP BUKA
Berapapun nilai tabungan anda pasti dapat bunga
GRAND PRIZE
2
Mitsubishi
Pajero Sport
60
Apple New iPad
10 Apple iPad 3 diundi tiap bulan
Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah GRAND PRIZE*
- Buka tabungan, setoran awal cukup Rp. 50.000,-
- Bunga tabungan 3x bunga rata-rata
- Narik dan transfer dimana saja bebas biaya*
- POKOK TETAP, tanpa dipotong biaya administrasi
- Setiap bulan bisa menang 10 Apple New iPad*
- Cuma di JABAR, peluang menang lebih besar!
- Total hadiah = 60 Apple New iPad & 2 Mitsubishi Pajero Sport
- Hadiah Periode 30 September 2012 s/d 28 Februari 2013
- Setiap kelipatan Rp. 500 ribu mendapatkan 1 poin undian.
- Tabungan harus dalam keadaan aktif, minimum melakukan transaksi (Tarik Tunai, Setor Tunai, Transfer, Pembayaran/Pembelian) 10x dalam1 bln.
*Promo ini berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan di BPR KS
*Untuk Hadiah Grand Prize minimum saldo Rp.5 juta
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
BPR KS
24/7 call center (022) 4556600
www.bprks.co.id